

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Fenomena Feminisasi Kemiskinan Pada Perempuan Miskin Di Rusunawa Bandarharjo, Semarang) dengan berfokus pada analisis peran Pemerintah Kota Semarang terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, analisis kondisi feminisasi kemiskinan di Semarang dan Rusunawa Bandarharjo, dan analisis kendala dan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memberdayakan dan melindungi perempuan miskin di Rusunawa Bandarharjo, Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan gender termasuk ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia sehingga berdampak pada kemiskinan perempuan. Rusunawa Bandarharjo penulis pilih dengan rasionalisasi sebagai Kelurahan termiskin dan daerah terkumuh di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Semarang menghadapi berbagai kendala. Masalah utama meliputi kurangnya tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang terhadap tahap pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta standardisasi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tidak adanya data terpilah gender, tidak efektifnya komunikasi publik dari pemerintah kepada perempuan miskin, dan kurangnya *monitoring* dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya pemaksimalan tiap tahap pemberdayaan dan perlindungan perempuan oleh Pemerintah Kota Semarang, pemaksimalan data terpilah gender mengenai kemiskinan, dan Pemerintah Kota Semarang harus mengedepankan *multidimensional approach* dalam pertimbangan menentukan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Kata Kunci: Kemiskinan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan.

ABSTRACT

This research examines Regional Regulation No. 7 of 2023 on the Empowerment and Protection of Women (Case Study of the Phenomenon of Feminization of Poverty among Poor Women in Rusunawa Bandarharjo, Semarang) by focusing on analyzing the role of the Semarang City Government in empowering and protecting women, analyzing the conditions of feminization of poverty in Semarang and Rusunawa Bandarharjo, and analyzing the constraints and efforts of the Semarang City Government in empowering and protecting poor women in Rusunawa Bandarharjo, Semarang. This research is motivated by gender inequality, including wage inequality between men and women in Indonesia, which has an impact on women's poverty. I chose Rusunawa Bandarharjo with the rationalization that it is the poorest village and the shabbiest area in Semarang City.

This research uses an empirical non-doctrinal approach with an analytical descriptive method. The results show that women's empowerment and protection in Semarang City faces various obstacles. The main problems include the Semarang City Government's lack of responsibility for the supervision, research and development, and standardization stages of women's empowerment and protection, the absence of gender-disaggregated data, ineffective public communication from the government to poor women, and the lack of monitoring and evaluation. This study recommends that the Semarang City Government maximize each stage of women's empowerment and protection, maximize gender-disaggregated data on poverty, and the Semarang City Government should prioritize a multidimensional approach in considering determining women's empowerment and protection policies.

Keywords: *Women's Poverty, Women's Empowerment, Women's Protection.*